

BAB V

KESIMPULAN

Meski suatu negara sudah meratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi dan telah menyusun konstitusi yang menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi perempuan dari tindakan-tindakan kekerasan berbasis gender, upaya perlindungan terhadap perempuan ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh implementasi yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait. Selain itu negara juga perlu untuk membuat program-program yang mendukung dan dapat meningkatkan kesetaraan wanita.

India dikenal sebagai negara yang maju dalam sektor teknologi namun hal tersebut tidak menjamin diskriminasi terhadap kaum perempuan terhapuskan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka diskriminasi gender di India salah satunya adalah sistem budaya yang mengakar dalam masyarakat. Hal itu masih tercermin dari beberapa praktek dalam kehidupan bermasyarakat di India.

Angka kekerasan yang masih tinggi baik, kemudian praktek sistem dowry atau pemberian yang dilakukan oleh pihak pengantin wanita kepada pihak pengantin laki-laki ketika menikahkan anaknya, dowry bisa berupa uang tunai, barang-barang berharga seperti perhiasan, alat elektronik, furniture dll, tergantung permintaan dari pihak laki-laki; kasus pembunuhan bayi perempuan di India dan aborsi selektif terhadap calon bayi berjenis kelamin perempuan; Operasi

pergantian jenis kelamin terhadap anak perempuan yang berumur di bawah 14 tahun.

Pada Desember 2012, terjadilah kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis di dalam bus di India. Kejadian itu rupanya menjadi titik balik perjuangan NGO di India dalam pembentukan hukum yang tidak gender neutral. Beberapa NGO yang berperan penting dalam hal tersebut adalah CSR, Jagori, SNEHA, dan Sayfty. Tentunya NGO tersebut juga bekerjasama dengan pemerintah India dan pihak-pihak lain seperti UN women dalam rangka penghapusan diskriminasi gender di India khususnya dalam isu kekerasan seksual.

Melalui sebuah proses advokasi, NGO diatas telah menjalankan tugas nya sebaga lembaga kemanusiaan nirlaba yang berfokus pada isu-isu kesetaraan wanita dan tidak berafiliasi pada suatu agama, politik, dan ideologi pemerintahan tertentu dalam menangani masalah kekerasan seksual di India. Proses advokasi tersebut pada akhirnya mampu menjembatani, membantu, serta mendorong pemerintah India untuk melahirkan hukum yang tidak gender neutral dengan di amandemennya Criminal Law Act pada tahun 2013.

Langkah-langkah yang dilakukan NGO diatas diantaranya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, bantuan dana, membuat perempuan dapat ikut serta dalam berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan pendapat mereka secara bebas kepada para perempuan yang mengalami tindakan kekerasasn seksual, serta menekan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan tertentu yang dalam bahasan skripsi kali ini adalah Criminal Law Amandement Act 2013. Meskipun angka pelaporan kekerasan seksual masih tinggi, namun

NGO memberikan dampak positif karena secara tidak langsung program-program bantuan yang mereka jalankan dapat meringankan beban kehidupan perempuan untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak perempuan.